

# Analisis Keterlibatan Uni Emirat Arab dalam Perang Saudara Sudan Tahun 2023 (*Analysis of the United Arab Emirates Involvement in the Sudanese Civil War in 2023*)

Nathanael Siburian<sup>1</sup>, Indrawati Indrawati<sup>2</sup>

Universitas 17 Agustus 1945, Jakarta<sup>1,2</sup>

[nathanaelsiburian0@gmail.com](mailto:nathanaelsiburian0@gmail.com)



## Riwayat Artikel:

Diterima pada 25 Desember 2024

Revisi 1 pada 14 Januari 2025

Revisi 2 pada 22 Januari 2025

Revisi 3 pada 2 Februari 2025

Disetujui pada 5 Februari 2025

## Abstract

**Purpose:** The purpose of this study is to analyze the involvement of the United Arab Emirates (UAE) in the Sudanese Civil War in 2023. It aims to explore the strategic motivations behind the UAE's actions, the extent of its influence in the conflict, and the impact of its involvement on the political, security, economic, military, and humanitarian dimensions of the war.

**Methodology:** This study uses a qualitative approach to analyze the United Arab Emirates' (UAE) involvement in the 2023 Sudanese Civil War. Secondary data is collected through a comprehensive literature review, utilizing academic sources, reports from international organizations, credible news outlets, and official documents.

**Results:** The United Arab Emirates (UAE) has utilized illegal gold trade as one of the means to strengthen its position in the conflict and fund military operations. Diplomatically, the UAE has leveraged political power and international relations to influence Sudan's policies and mediate peace processes that benefit its interests.

**Limitations:** The limitations of this study include the reliance on secondary data sources, which may present biases or incomplete information. Additionally, the dynamic and evolving nature of the Sudanese Civil War in 2023 means that new developments may not be fully captured in this analysis.

**Contribution:** This study contributes to the understanding of the United Arab Emirates' strategic involvement in the Sudanese Civil War by analyzing its political, military, and economic influence. It offers new insights into how UAE utilizes geopolitical leverage, including gold trade and diplomatic efforts, to advance its regional interests and strengthen its position in the Middle East.

**Keywords:** *United Arab Emirates, Sudan Civil War, International Politics, Regional Conflict, Stability*

**How to Cite:** Siburian, N., Indrawati, I. (2024). Analisis Keterlibatan Uni Emirat Arab dalam Perang Saudara Sudan Tahun 2023. *Jurnal Studi Ilmu Sosial dan Politik*, 4(2), 85-96.

## 1. Pendahuluan

Perang saudara di Sudan telah memasuki tahun kedua, dua faksi yang bertikai tetap terjebak dalam perebutan kekuasaan yang mematikan. Sejak konflik dimulai pada 15 April 2023, hampir 15.000 orang dilaporkan tewas, dan lebih dari 8,2 juta orang terpaksa mengungsi, menjadikannya salah satu krisis pengungsian terburuk di dunia (Ayuningrum, 2018). Sekitar 2 juta pengungsi Sudan telah melarikan diri ke wilayah-wilayah yang tidak stabil seperti Chad, Ethiopia, dan Sudan Selatan, memadati kamp-kamp pengungsi yang ada dan menimbulkan kekhawatiran bahwa pengungsi Sudan pada akhirnya dapat mencoba memasuki Eropa. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) terus menyerukan lebih banyak bantuan internasional karena lebih dari 25 juta orang membutuhkan bantuan kemanusiaan, sementara krisis keamanan pangan yang semakin buruk berpotensi menciptakan krisis kelaparan terbesar di dunia. Di sisi lain, upaya mediasi untuk menghentikan konflik sejauh ini belum berhasil, karena para pemimpin Sudanese Armed Forces (SAF) dan Rapid Support Forces (RSF) menolak

menghentikan kekerasan mereka, sementara aktor regional dan internasional telah terlibat dengan memilih pihak dalam perang ini (Yulianti et al., 2024).

Pertempuran antara faksi-faksi bersenjata pecah di ibu kota Sudan, Khartoum yang terjadi pada April 2023, memicu kekhawatiran akan kembalinya perang saudara dalam skala penuh. Konflik ini berakar pada perebutan kekuasaan antara dua pemimpin utama yaitu, Jenderal Abdel Fattah al-Burhan dari Angkatan Bersenjata Sudan (SAF) dan Mohamed Hamdan Hemedti Dagalo dari kelompok paramiliter Pasukan Dukungan Cepat (RSF). Kedua pihak saling bertempur untuk menguasai negara dan sumber daya strategisnya. Seiring dengan meningkatnya intensitas konflik, kondisi kemanusiaan memburuk secara signifikan, menghapus harapan akan transisi menuju demokrasi yang telah lama dinantikan (Yordan Gunawan, 2024). Pada paruh pertama abad kedua puluh, Sudan berada di bawah protektorat bersama antara Mesir dan Inggris, yang dikenal dengan nama Kondominium Inggris-Mesir. Dalam pengaturan ini, Inggris memegang kekuasaan politik dan militer yang dominan. Mesir dan Inggris kemudian menandatangani perjanjian yang memberikan kedaulatan kepada Republik Sudan yang merdeka pada tahun 1956 (Natamiharja et al., 2025). Namun, negara baru ini segera menghadapi tantangan besar, dimana wilayah Sudan yang sangat luas, hampir satu juta mil persegi, terletak di tengah-tengah beberapa kawasan paling rawan di Afrika (Elizabeth, 2021). Lebih memprihatinkan lagi adalah kesenjangan internal yang besar antara wilayah utara yang lebih kaya, mayoritas Arab dan Muslim, dan wilayah selatan yang lebih terbelakang, dengan mayoritas penduduknya menganut agama Kristen atau animisme. Ketimpangan ini menjadi penyebab utama dua perang saudara, yang akhirnya mengarah pada pemisahan Sudan menjadi dua negara pada tahun 2011. Perang Saudara Sudan yang kedua, yang berlangsung dari 1983 hingga 2005, sangat brutal dimana terjadinya kelaparan dan kejahatan kemanusiaan tercatat secara luas, dengan korban mencapai sekitar dua juta jiwa. Pada Juli 2011, wilayah selatan Sudan akhirnya memisahkan diri dan membentuk negara baru Republik Sudan Selatan (Dharmapati et al., 2015).

Ekspansi kuburan massal di wilayah Darfur, Sudan, serta kekerasan genosida yang mewarnai perebutan kendali atas kota-kota utama, mencerminkan penderitaan kemanusiaan yang mengerikan. Meskipun perang terus terjadi di berbagai belahan dunia, intensitas dan skala konflik di Sudan tidak ada tandingannya. Sejak perang saudara pecah pada April 2023, sekitar sepuluh juta warga Sudan telah kehilangan tempat tinggal. Bahkan, satu dari delapan pengungsi internal di dunia berasal dari Sudan, dengan jumlah anak-anak yang terpaksa mengungsi di negara tersebut lebih tinggi dibandingkan negara lain mana pun (Giudice, 2024). Ironisnya, perhatian dunia terhadap tragedi ini tampak minim. Hanya 31 persen dari total \$2,7 miliar yang diajukan PBB untuk menangani krisis di Sudan telah berhasil terkumpul dari para donor menyisakan kekurangan yang semakin memperparah kelaparan. Sesekali, pemerintah berbagai negara mengumumkan sanksi, atau para pemimpin dunia dan organisasi internasional mengeluarkan pernyataan keprihatinan. Namun, sebagian besar tindakan tersebut terbukti tidak efektif dalam menghentikan kekerasan yang terus berlanjut (Lumintosari et al., 2021).

Tidak ada negara yang cukup berupaya untuk mengakhiri penderitaan di Sudan, meskipun beberapa negara terlibat aktif dalam memperburuk perang saudara di negara tersebut. Mesir, Iran, dan Turki memberikan dukungan militer kepada Khartoum, meskipun terdapat bukti bahwa Angkatan Bersenjata Sudan (SAF) terlibat dalam serangan pengeboman dan penyiksaan yang tidak pandang bulu, serta menggunakan kelaparan sebagai senjata perang (Nindar et al., 2023). Awalnya, Rusia mendukung Pasukan Dukungan Cepat (RSF) yang merupakan kelompok paramiliter dalam konflik ini, yang berakar dari milisi Janjaweed yang melakukan genosida di Darfur dua dekade lalu. Namun, kini Moskow bermain di kedua sisi, pada Mei 2023, mereka menandatangani kesepakatan dengan SAF untuk mendirikan pangkalan logistik Rusia di Laut Merah sebagai imbalan untuk senjata dan peralatan. Sementara itu, Arab Saudi, yang memiliki hubungan lama dengan SAF, berbulan-bulan melemahkan usaha untuk melanjutkan negosiasi antara pihak-pihak yang bertikai yang sempat terhenti pada akhir 2023. Hanya pada bulan Juli 2024, Amerika Serikat memperoleh persetujuan dari Arab Saudi untuk memulai kembali perundingan yang dijadwalkan berlangsung pada Agustus di Jenewa (Najmasani, 2023).

Adapun aktor eksternal yang paling bertanggung jawab atas kelaparan dan pembersihan etnis di Sudan adalah Uni Emirat Arab (Prendergast & Lake, 2024). Ketika Pasukan Dukungan Cepat (RSF) melancarkan serangan genosida terhadap warga sipil di Darfur dan wilayah lainnya, Abu Dhabi mengirimkan senjata kepada milisi tersebut. Di sisi lain, perusahaan-perusahaan yang tidak bertanggung jawab turut menyelundupkan emas Sudan ke pasar-pasar Emirat, yang semakin memperburuk konflik. UEA dapat bertindak tanpa rasa takut akan konsekuensi karena cadangan minyaknya yang besar, kepentingan strategisnya dalam menyeimbangkan kekuatan dengan Iran, serta perannya dalam upaya diplomatik untuk mengakhiri perang di Jalur Gaza, yang membuat pemimpin Barat ragu untuk menekan Abu Dhabi secara berlebihan. Mengingat peran besar Uni Emirat Arab (UEA) dalam memicu krisis di Sudan, sangat penting bagi aktor internasional untuk mendesak para pemimpin Emirat agar mengubah kebijakan mereka (Laqzmitha & Yumitro, 2023).

Amerika Serikat dan beberapa sekutunya mengambil tindakan, seperti menerapkan sanksi yang lebih luas atau berinvestasi dalam pasukan penjaga perdamaian baru di Darfur, begitupun dengan aktor publik dan swasta masih memiliki cara untuk menekan Emirat. Mereka dapat menggunakan pengaruh mereka melalui berbagai saluran, seperti perdagangan emas konflik, kepentingan finansial UEA dalam tim olahraga, pembelian senjata dari AS, serta ketergantungan Emirat pada pelobi di Washington (Ching, 2024). Jika tekanan ini cukup kuat, Abu Dhabi mungkin akan menyadari bahwa dukungannya terhadap RSF membawa lebih banyak masalah daripada manfaat. Posisi Uni Emirat Arab (UEA) semakin diperkuat dengan penandatanganan Perjanjian Abraham, yang disponsori oleh Amerika Serikat pada tahun 2020, bertujuan untuk menormalisasi hubungan antara negara-negara Arab dan Israel. Amerika Serikat juga mendorong normalisasi hubungan antara Arab Saudi dan Israel, meskipun Riyadh belum memberikan respons secara resmi. Dalam konteks perang di Yaman yang terjadi pada tahun 2019 (Nugraha et al., 2022), pemerintahan Trump menanggukahkan penjualan senjata ke Arab Saudi, namun tetap memutuskan untuk mengirimkan jet tempur F-35 ke Uni Emirat Arab (UEA). Meskipun demikian, pemerintahan Biden menanggukahkan penjualan tersebut untuk dilakukan peninjauan ulang. Jika kesepakatan ini terealisasi, UEA akan menjadi negara Arab pertama yang menerima pesawat tempur canggih tersebut (Mohammed, 2023). Adapun rumusan masalah pada penelitian ini adalah: Apa kepentingan Uni Emirat Arab dalam perang saudara di Sudan yang terjadi pada tahun 2023?

## 2. Tinjauan pustaka dan pengembangan hipotesis

Kepentingan nasional, yang dalam bahasa Prancis dikenal sebagai *raison d'État*, merujuk pada tujuan dan ambisi suatu negara di bidang ekonomi, militer, atau budaya. Dalam kajian utama Hubungan Internasional, konsep ini dianggap fundamental sebagai dasar negara dalam menjalankan hubungan internasional. Gagasan Machiavelli tentang kepentingan nasional sering dijadikan rujukan dalam praktik maupun teori, karena memberikan justifikasi terhadap perilaku negara yang cenderung mengabaikan nilai-nilai utama pada masa lalu, seperti agama dan moralitas. Negara dipandang sebagai entitas yang lepas dari tatanan ilahi dan berfokus pada kebutuhan spesifiknya, yakni kepentingan nasional. Kepentingan nasional memiliki keterkaitan erat dengan kekuasaan (*power*), baik sebagai tujuan maupun alat, khususnya dalam bentuk kekuatan destruktif (*hard power*). Ketika kepentingan nasional diarahkan untuk mengejar kekuasaan, dan kekuasaan digunakan sebagai sarana untuk mencapainya, konsekuensinya adalah munculnya persaingan, perimbangan kekuatan, konflik, dan perang dalam sistem internasional yang dipandang anarkis, di mana tidak ada otoritas tertinggi selain kekuatan itu sendiri (Viroli, 1998).

Jack C. Plano dan Roy Olton, kepentingan nasional merupakan tujuan utama sekaligus faktor paling krusial yang memengaruhi pengambilan keputusan para pembuat kebijakan dalam merumuskan politik luar negeri. Selain itu, kepentingan nasional menurut mereka adalah suatu tujuan yang ingin dicapai oleh suatu negara untuk melindungi atau meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya, menjaga keberlangsungan hidup negara dan memastikan kedaulatannya dalam sistem internasional. Meskipun konsep ini bersifat sangat umum, kepentingan nasional tetap menjadi elemen yang esensial bagi suatu negara. Elemen tersebut meliputi berbagai aspek penting seperti kelangsungan hidup bangsa dan negara, kedaulatan, keutuhan wilayah, kemerdekaan, keamanan militer, serta kesejahteraan ekonomi. Adapun komponen utama kepentingan nasional menurut mereka yaitu, melindungi identitas nasional, budaya, dan nilai-nilai fundamental masyarakat. Tidak hanya itu saja, kepentingan nasional juga sering kali

menjadi landasan utama dalam merancang kebijakan luar negeri suatu negara, baik dalam aspek diplomasi, militer, maupun ekonomi (Plano & Olton, 1988).

Hans Morgenthau mendefinisikan kepentingan nasional sebagai usaha suatu negara untuk meraih kekuasaan yang memungkinkan pengendalian dan keberlanjutan eksistensinya. Dalam pandangannya, kekuatan nasional menjadi instrumen penting dalam mencapai kekuasaan tersebut, mengingat tujuan utama politik negara adalah melindungi kepentingan nasional (Morgenthau, 1985). Kepentingan nasional mencakup berbagai aspek, seperti mempertahankan integritas wilayah, keamanan, kesejahteraan, kedudukan negara, kekuasaan, ideologi, dan ekonomi. Semua ini diwujudkan melalui kebijakan yang disusun oleh para pengambil keputusan, bersifat strategis, berjangka panjang, dan dianggap sebagai layanan utama negara kepada bangsa dan rakyatnya. Pada akhirnya, kepentingan nasional dapat diartikan sebagai prioritas utama yang ingin dicapai oleh negara. Dengan kekuasaan yang dimiliki, negara mengambil langkah-langkah kebijakan untuk memastikan tujuan tersebut tercapai, baik secara domestik maupun internasional. Setiap negara memiliki elemen-elemen utama dalam kepentingan nasionalnya, seperti kebebasan, kedaulatan, keadilan, kemakmuran, kesejahteraan, keamanan, dan kebahagiaan masyarakat. Tingkat pencapaian sasaran tersebut sangat bergantung pada prioritas dan nilai strategisnya bagi negara tersebut. Kepentingan nasional dirumuskan berdasarkan kemampuan internal negara, seperti sumber daya, kekuatan politik, ekonomi, dan militer, yang kemudian digabungkan ke dalam konsep kekuasaan. Kekuasaan memainkan peran sentral dalam mendukung strategi untuk mencapai kepentingan nasional melalui kebijakan yang dirancang secara efektif. Dalam menentukan arah kepentingan nasional, pencapaian tujuan kebijakan luar negeri bergantung pada analisis peluang dan kendala yang dihadapi negara dalam lingkup eksternal. Faktor eksternal ini meliputi dinamika hubungan internasional, tekanan geopolitik, aliansi strategis, serta keadaan global yang memengaruhi ruang gerak dan keputusan negara tersebut (Morgenthau, 1985).

### **3. Metodologi penelitian**

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah pendekatan kualitatif untuk menganalisis keterlibatan Uni Emirat Arab (UEA) dalam perang saudara di Sudan pada tahun 2023. Pendekatan kualitatif bertujuan untuk menyelidiki, menemukan, menggambarkan, dan menjelaskan karakteristik atau keistimewaan dari fenomena sosial tertentu. Penelitian kualitatif ini didasarkan pada studi kepustakaan, yang dapat membuat peneliti mengumpulkan informasi relevan terkait topik yang dibahas, memperdalam pemahaman, dan memperluas pengetahuan melalui berbagai sumber seperti buku, jurnal, artikel, serta dokumen lain yang relevan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini melalui studi kepustakaan. Sumber-sumber data ini dikumpulkan dari perpustakaan, *platform* daring, serta publikasi akademik dan berita *online*. Data dikumpulkan melalui proses pencarian sistematis di berbagai *platform* akademik dan sumber terpercaya untuk memastikan validitas dan reliabilitas informasi. Peneliti juga menggunakan analisis deskriptif untuk menginterpretasikan data, mengidentifikasi pola, dan menjelaskan keterkaitan antara keterlibatan UEA dengan dinamika konflik di Sudan, khususnya dalam aspek politik, militer, keamanan dan kemanusiaan. Kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini melibatkan konsep geopolitik dan teori kepentingan nasional, yang membantu menguraikan motif strategis UEA serta dampaknya terhadap stabilitas kawasan. Penelitian ini juga mempertimbangkan perspektif historis dan kontemporer guna memberikan pemahaman yang lebih menyeluruh terkait isu yang diteliti.

### **4. Hasil dan pembahasan**

#### **4.1. Gambaran Umum Perang Saudara Sudan**

Sudan terletak di Afrika Timur Laut dan merupakan salah satu negara terbesar di benua tersebut, dengan luas wilayah mencapai 1,9 juta kilometer persegi (734.000 mil persegi). Sudan, sebuah negara yang kaya akan keanekaragaman budaya dan memiliki warisan sejarah yang penting, telah mengalami penderitaan mendalam akibat sejarah panjangnya yang penuh gejolak, yang ditandai oleh konflik internal berkepanjangan. Negara ini sering dianggap sebagai salah satu yang termiskin di Afrika (Sihombing, 2016). Istilah "Perang Saudara Sudan" mengacu pada rangkaian konflik yang berlangsung lama dan secara mendalam membentuk perjalanan sejarah negara tersebut selama beberapa dekade. Kajian menyeluruh ini bertujuan untuk mengungkap akar penyebab, tahapan, dan dampak berkelanjutan dari Perang Saudara Sudan, guna memberikan pemahaman mendalam terhadap konflik yang kompleks dan berlarut-larut. Untuk memahami krisis Sudan secara menyeluruh, penting untuk menelusuri kembali

sejarah kolonialnya. Dari tahun 1899 hingga 1956, Sudan berada di bawah pemerintahan bersama Inggris dan Mesir. Setelah meraih kemerdekaan, negara ini menghadapi perebutan kekuasaan dan sumber daya, dengan perbedaan yang mencolok antara wilayah utara yang didominasi oleh Arab-Muslim dan wilayah selatan yang mayoritas non-Arab, serta menganut agama Kristen atau animisme. Ketegangan ini menjadi garis pemisah utama yang membentuk dinamika politik dan sosial di Sudan (Setyawan, 2015).

Pada masa-masa awal berdirinya Sudan sebagai suatu negara merdeka, pemerintah menghadapi tantangan besar untuk menyelaraskan berbagai kepentingan kelompok masyarakatnya. Kegagalan dalam mengatasi perbedaan ini memicu ketidakpuasan dan serangkaian konflik. Benih-benih Perang Saudara Sudan pun mulai tumbuh pada periode tersebut, dengan konflik yang memuncak akibat kesenjangan etnis, agama, dan ekonomi yang tidak terselesaikan. Letusan kekerasan besar pertama terjadi pada tahun 1955, bahkan sebelum Sudan memperoleh kemerdekaan sepenuhnya. Wilayah selatan, yang merasa terpinggirkan oleh pemerintah pusat di Khartoum, memberontak, yang kemudian menandai dimulainya Perang Saudara Sudan Pertama (Junaidi & Artikel, 2022). Konflik ini berlangsung hingga tahun 1972 dan akhirnya dihentikan sementara oleh Perjanjian Addis Ababa. Perjanjian ini memberikan otonomi kepada wilayah selatan dan untuk sesaat meredakan ketegangan. Namun, perdamaian yang rapuh tersebut hancur pada tahun 1983 ketika Presiden Gaafar Nimeiry mencabut otonomi wilayah selatan dan memberlakukan hukum Islam (Syariah) di seluruh Sudan. Keputusan ini memicu kembali konflik, yang berkembang menjadi Perang Saudara Sudan Kedua, sebuah konflik menghancurkan yang berlangsung lebih dari dua dekade (Cahyati, 2017).

Sudan People's Liberation Army/Movement (SPLA/M), yang dipimpin oleh John Garang, muncul sebagai aktor utama dalam konflik ini, dengan tujuan utama memperjuangkan kemerdekaan wilayah selatan. Perang ini diwarnai oleh berbagai pelanggaran hak asasi manusia yang parah, termasuk pengungsian massal, kelaparan, serta kejahatan yang dilakukan oleh kedua belah pihak (Izzurrahman & Machmudi, 2024). Selain itu, dinamika regional turut memengaruhi konflik, dengan keterlibatan berbagai negara tetangga yang memainkan peran signifikan dalam situasi tersebut. Perang Saudara Sudan Kedua (1983–2005) memiliki akar yang kompleks, mencakup faktor sejarah, politik, ekonomi, dan sosial. Beberapa penyebab utama konflik ini meliputi perbedaan agama dan etnis, alokasi sumber daya yang tidak merata, penerapan hukum Syariah Islam, marginalisasi politik, serta munculnya pemberontakan bersenjata. Titik balik konflik terjadi pada tahun 2005, ketika Perjanjian Perdamaian Komprehensif (Comprehensive Peace Agreement/CPA) ditandatangani antara pemerintah Sudan dan SPLA/M. Perjanjian ini memberikan otonomi selama enam tahun kepada wilayah Sudan Selatan, yang akan diakhiri dengan referendum kemerdekaan. Kesepakatan ini menjadi dasar pembentukan Sudan Selatan sebagai wilayah semi-otonom. Pada tahun 2011, rakyat Sudan Selatan melalui referendum memilih untuk merdeka, yang akhirnya mengarah pada pembentukan Republik Sudan Selatan. Meskipun Perang Saudara Sudan Kedua berakhir, tantangan baru muncul, termasuk konflik internal yang melanda Sudan Selatan (Setyawan, 2015).

Namun, setelah Sudan Selatan memisahkan diri, konflik terus berlanjut dalam bentuk Perang Sudan 2023. Wilayah Darfur, yang terletak di bagian barat Sudan, menjadi titik fokus kekerasan dan pengungsian massal. Konflik Darfur, yang mendapatkan perhatian internasional pada awal tahun 2000-an, berakar pada perebutan sumber daya, ketegangan etnis, dan persaingan kekuasaan politik (Khairunnisa, 2023). Respons pemerintah Sudan terhadap gerakan pemberontakan di Darfur memicu krisis kemanusiaan yang parah, termasuk tuduhan genosida, pengungsian massal, dan kejahatan yang meluas. Meskipun dinamika konflik di Darfur berbeda dari pertikaian antara wilayah utara dan selatan, konflik ini mencerminkan tantangan mendalam Sudan terkait tata kelola, distribusi sumber daya, dan identitas nasional (Sihombing, 2016). Perang Saudara Sudan tidak dapat dipahami tanpa memperhatikan pengaruh regional dan internasional. Negara-negara tetangga, seperti Chad dan Ethiopia, terlibat dalam berbagai tahap konflik, baik sebagai mediator maupun sebagai pihak aktif. Selain itu, komunitas internasional, termasuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan Uni Afrika, menghadapi tantangan dalam menjaga perdamaian, memberikan bantuan kemanusiaan darurat, dan mengupayakan solusi diplomatik (Ochieng, 2023).

Akar penyebab Perang Saudara Sudan sangat erat kaitannya dengan faktor historis, sosial, dan ekonomi. Isu tata kelola yang buruk, ketegangan identitas agama, serta alokasi sumber daya yang tidak merata telah menjadi pemicu utama sekaligus pengabadinya. Tantangan-tantangan yang terus berlangsung meliputi kebutuhan akan tata kelola yang inklusif dan komprehensif, distribusi sumber daya yang adil, serta penanganan dampak konflik yang berkepanjangan, seperti pengungsian massal, trauma psikologis, dan kesenjangan ekonomi. Di luar dimensi geopolitik dan diplomatik, penting untuk memberi perhatian pada dampak langsung konflik terhadap kehidupan warga sipil (Nugroho, 2019). Mereka menjadi pihak yang paling dirugikan, menghadapi pengungsian, kehilangan mata pencaharian, serta trauma mendalam akibat kekerasan yang meluas. Konflik ini telah memecah-belah keluarga, mengguncang struktur masyarakat, dan secara permanen mengubah tatanan sosial di Sudan. Sifat konflik yang berlarut-larut juga berdampak pada generasi muda, yang tumbuh di tengah kekerasan. Hal ini menghambat akses mereka terhadap pendidikan, melanggengkan siklus kemiskinan, dan menciptakan tantangan besar bagi pembangunan manusia. Dampak psikologis yang dialami individu, terutama anak-anak yang menjadi saksi maupun korban konflik, memunculkan kekhawatiran serius tentang kesejahteraan jangka panjang masyarakat Sudan secara keseluruhan (D. S. Staff, 2024).

#### **4.2. Keterlibatan Uni Emirat Arab dalam Perang Saudara Sudan**

Uni Emirat Arab (UEA) memainkan peran yang signifikan dalam perang saudara Sudan, yang dapat dianalisis melalui beberapa aspek, seperti dukungan politik, diplomatik, ekonomi, dan militernya (Salma, 2022). Uni Emirat Arab telah menjadi salah satu aktor penting dalam konflik Sudan. Berikut adalah analisis rinci keterlibatan UEA dalam perang saudara ini:

- 1) Dukungan Finansial kepada Faksi-faksi Militer: Uni Emirat Arab (UEA) memberikan dukungan keuangan yang signifikan kepada kelompok-kelompok tertentu, seperti Rapid Support Forces (RSF), untuk memperkuat pengaruhnya dalam konflik. Dukungan ini termasuk bantuan logistik dan pengiriman persenjataan. Dalam konflik Perang Saudara di Sudan, baik tentara pemerintah maupun milisi pemberontak telah terlibat dalam pembunuhan massal warga sipil dan melakukan pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia (D. S. Staff, 2024). Krisis kelaparan semakin memburuk, dengan kedua belah pihak menggunakan gangguan terhadap pasokan makanan sebagai strategi perang. Konflik ini, yang sebagian besar telah terabaikan oleh perhatian internasional, memunculkan masalah penting yang sering diabaikan dan peran negara-negara pendukung pihak-pihak yang bertikai, yang secara langsung maupun tidak langsung memungkinkan konflik terus berlangsung (Khoirunnisa et al., 2024). Salah satu aktor utama dalam mendukung konflik ini adalah Uni Emirat Arab (UEA), yang memiliki kepentingan ekonomi dan politik signifikan di kawasan tersebut (Sidhu, 2024). UEA secara aktif mendukung milisi pemberontak dengan menyediakan sumber daya dan bantuan lainnya (Rickett, 2024). Dukungan ini tidak hanya memperpanjang konflik tetapi juga memperumit upaya untuk mencapai resolusi damai di Sudan. Banyak wilayah yang paling parah terdampak berada di kawasan Darfur, di mana milisi Rapid Support Forces (RSF) telah menguasai sejumlah wilayah dan saat ini mengepung kota El Fasher. Jika kota tersebut jatuh, potensi terjadinya pembantaian besar-besaran sangat tinggi. RSF berakar dari milisi yang melakukan genosida di Darfur dua dekade lalu dan kini kembali dituduh terlibat dalam genosida, termasuk pembunuhan massal bermotif etnis serta berbagai kekejaman lainnya. Di sisi lain, lawan mereka, Sudanese Armed Forces (SAF), telah memblokir akses kemanusiaan utama di perbatasan dengan Chad, memperburuk situasi kemanusiaan di wilayah tersebut (Darwich, 2024).
- 2) Eksploitasi Sumber Daya Alam: UEA memanfaatkan perang untuk mengamankan akses terhadap sumber daya strategis, terutama emas Sudan. Negara ini menjadi pusat perdagangan emas ilegal yang memungkinkan kedua belah pihak dalam konflik mendanai operasi militer mereka. Aktor terbesar dalam konflik ini adalah Uni Emirat Arab (UEA), sebuah negara Teluk yang kaya minyak dan semakin menegaskan pengaruhnya di banyak negara Afrika (Ochieng, 2023). Keterlibatan UEA dalam perang saudara Sudan tidak hanya bertujuan untuk melindungi kepentingannya, tetapi juga untuk memperkuat posisi strategisnya di kawasan Afrika Timur dan Laut Merah. Dukungan mereka terhadap Pasukan Dukungan Cepat (RSF) dan peran mereka dalam perdagangan emas, investasi, serta diplomasi menunjukkan kedalaman pengaruh UEA dalam konflik ini. Bentuk keterlibatan UEA dalam konflik ini menjadi dukungan militer kepada pasukan pendukung cepat seperti pasokan senjata dan keterkaitan dengan konflik Yaman. Perdagangan emas Sudan memiliki

- keterlibatan dalam peran RSF dalam Pertambangan emas dan kepentingan ekonomi UEA (MEE correspondent, 2019).
- 3) **Diplomasi dan Dukungan Politik:** Uni Emirat Arab (UEA) memanfaatkan hubungan diplomatik untuk memengaruhi pemerintahan transisi Sudan dan mempromosikan kebijakan yang sejalan dengan kepentingannya, termasuk memediasi kesepakatan politik yang memperkuat posisinya di kawasan (Pradana et al., 2021). Uni Emirat Arab memberikan bantuan kemanusiaan kepada masyarakat Sudan, tetapi bantuan ini sering diarahkan ke wilayah yang dikuasai oleh pihak yang mereka dukung, seperti Rapid Support Forces (RSF) dalam distribusi bantuannya. Pengaruh diplomatik dan regional dengan UEA menggunakan jalur diplomasi untuk memengaruhi hasil konflik Sudan, baik melalui organisasi regional seperti Liga Arab maupun forum internasional (Chibelushi, 2023). UEA aktif berupaya membatasi pengaruh Turki dan Qatar, yang mendukung elemen-elemen Islamis di Sudan dalam melawan pengaruh pihak lain. UEA ingin memastikan akses dan kontrol terhadap pelabuhan Sudan yang strategis di Laut Merah untuk memperkuat kehadiran militernya dan mengamankan jalur perdagangan. Keamanan laut merah dalam pangkalan militer dan pelabuhan terdapat konflik Sudan yang dianggap sebagai ancaman terhadap stabilitas kawasan Laut Merah, yang menjadi kepentingan strategis UEA dalam stabilitas regional. UEA bekerja sama dengan Arab Saudi dalam menentukan kebijakan terhadap Sudan. Namun, kedua negara juga memiliki perbedaan strategi, terutama terkait dengan dukungan kepada pihak-pihak yang terlibat dalam konflik (Lumintosari et al., 2021).
  - 4) **Pemberian Bantuan Ekonomi:** Bantuan ekonomi dalam bentuk dukungan terhadap sektor pertanian dan infrastruktur digunakan UEA untuk memenangkan hati masyarakat Sudan dan meningkatkan pengaruhnya di tingkat lokal. Konflik perang saudara Sudan meletus pada April 2023 (Tobin, 2024), dipicu oleh perebutan kekuasaan antara dua tokoh utama yaitu, Abdel Fattah al-Burhan selaku Panglima Angkatan Bersenjata Sudan (SAF) dan kepala junta yang berkuasa, serta Mohamed Hamdan Dagalo atau yang lebih dikenal sebagai Hemedti selaku pemimpin Pasukan Dukungan Cepat (RSF). Keduanya sebelumnya bekerja sama dalam kudeta Oktober 2021 yang menggulingkan pemerintahan sipil di Sudan (RA et al., 2019). Namun, rencana untuk mengintegrasikan RSF ke dalam SAF menjadi pemicu utama perselisihan, terutama terkait perebutan kepemimpinan dan yang lebih penting, kendali atas sumber daya strategis negara (Musa, 2022). Di balik persetujuan kedua tokoh ini, terdapat dinamika yang lebih kompleks yang melibatkan aktor-aktor eksternal. Beberapa negara memilih berpihak dalam konflik ini, sehingga memperpanjang eskalasi kekerasan. Campur tangan mereka didorong oleh kepentingan strategis dalam permainan pengaruh regional dan global. Dalam beberapa kasus, pendekatan pragmatis yang mendasari keputusan mereka di mana musuh dari musuh dianggap sebagai sekutu dalam memperburuk situasi yang sudah rumit (M. Staff, 2023).

### **4.3. Kepentingan Uni Emirat Arab dalam Perang Saudara Sudan**

Kepentingan nasional Uni Emirat Arab (UEA) dalam konteks perang saudara Sudan dapat dipahami melalui kaitannya dengan kekuasaan (*power*), baik sebagai tujuan maupun alat untuk mencapai tujuan strategisnya. Uni Emirat Arab, sebagai salah satu aktor dominan dalam kawasan Timur Tengah dan Afrika, menggunakan pendekatan *hard power* untuk memperkuat posisinya di wilayah ini. Dalam perang saudara Sudan, kepentingan UEA diarahkan pada pengamanan akses terhadap sumber daya strategis, seperti emas, serta memperluas pengaruh geopolitiknya di wilayah Afrika Timur. Salah satu alasan utama di balik kepentingan Uni Emirat Arab (UEA) di Sudan adalah kekayaan sumber daya alam yang dimiliki negara tersebut (Bassim, 2024). Sudan memiliki cadangan emas yang signifikan, yang telah lama menarik perhatian Abu Dhabi, sebagai salah satu pengimpor utama emas (Arbar, 2023).

Menurut Hans Morgenthau, kepentingan nasional meliputi beberapa aspek antara lain, mempertahankan integritas wilayah, keamanan, kesejahteraan, kedudukan negara, kekuasaan, ideologi, dan ekonomi (Morgenthau, 1985). Aspek-aspek tersebut dapat dijelaskan satu per satu sebagai berikut:

- 1) **Mempertahankan integritas wilayah:** Posisi geografis Sudan yang strategis, sebagai jalur transit penting antara Timur Tengah dan Afrika, menambah dimensi geopolitik pada keterlibatan Uni Emirat Arab (UEA). Pembangunan pelabuhan di kawasan Laut Merah yang merupakan jalur vital bagi perdagangan global dirancang untuk meningkatkan kendali UEA atas arus perdagangan maritim (Mahjoub, 2024). Dengan demikian, UEA tidak hanya memperkuat pijakan ekonominya tetapi juga menciptakan manfaat strategis untuk memengaruhi perdagangan internasional. Uni Emirat Arab (UEA) memiliki kepentingan ekonomi yang signifikan di Sudan. Negara ini menjadi

- penerima utama ekspor emas Sudan, dengan sebagian emas tersebut diduga diteruskan ke Rusia (Bassim, 2024). Uni Emirat Arab (UEA) menjadi penerima manfaat utama dari perdagangan ini, dengan hampir seluruh emas yang diselundupkan dari Sudan berakhir di UEA. Negara ini juga berfungsi sebagai pusat pencucian emas sebelum logam tersebut diperdagangkan di pasar global. Berdasarkan data terbaru, UEA secara resmi mengimpor emas dari Sudan dengan nilai sekitar \$2,3 miliar pada tahun 2022 (Cafiero, 2023).
- 2) Keamanan: Kehadiran keamanan pada Laut Merah untuk Uni Emirat Arab (UEA) yang ingin menjaga stabilitas dan keamanan Laut Merah, karena kawasan ini sangat penting bagi transportasi minyak dan perdagangan global (Chibelushi, 2023). Instabilitas di Sudan dapat mengancam kepentingan maritim UEA di kawasan tersebut. Dengan kehadiran pelabuhan strategis di Sudan juga menjadi target utama UEA untuk memperluas jaringan pelabuhan dan infrastruktur logistiknya. Setelah kehadirannya dalam bidang keamanan, timbul investasi pertanian dimana Sudan memiliki lahan subur yang luas, dan UEA telah berinvestasi di sektor agrikultur untuk mengamankan pasokan pangan bagi negaranya (Ching, 2024). Perang saudara yang diakibatkan oleh Sudan yang berada di wilayah Utara dan Selatan dapat mengganggu investasi ini. Sudan memiliki cadangan mineral dan minyak yang signifikan. UEA melihat peluang ekonomi dalam mengendalikan akses terhadap sumber daya ini melalui dukungan politik dan militer, terutama dalam konteks eksploitasi sumber daya alam. (Prendergast & Lake, 2024). Uni Emirat Arab memiliki kepentingan dalam proyek infrastruktur penting, seperti pelabuhan di Laut Merah, termasuk Pelabuhan Suakin dan Port Sudan. Agrikultur dalam Sudan menjadi tujuan utama investasi UEA di sektor pertanian, yang menjadi bagian dari strategi ketahanan pangan UEA. Konflik dapat mengancam investasi ini, sehingga UEA mendukung pihak-pihak dalam melindungi kepentingannya yang menjadi salah satu investasi ekonomi yang berada di Sudan (Khairunnisa, 2023). Selain itu, UEA mendukung aktor non-negara seperti RSF sebagai bagian dari strategi jangka panjang untuk membangun hubungan yang menguntungkan dengan kelompok kuat di Sudan. Beberapa bantuan kemanusiaan dengan agenda strategis digunakan UEA untuk meningkatkan citranya sebagai aktor positif di kancah internasional dalam meningkatkan citra global (Townsend, 2024).
  - 3) Kesejahteraan: Sudan memiliki lahan pertanian subur yang menjadi daya tarik bagi UEA dalam memenuhi kebutuhan pangan domestik. Investasi UEA di sektor pertanian Sudan, termasuk proyek infrastruktur yang mendukung distribusi hasil panen, merupakan bagian dari strategi jangka panjang untuk memastikan ketahanan pangan bagi warganya (Arbar, 2023). Dengan mengelola sektor pertanian Sudan, UEA dapat mengurangi ketergantungan pada impor dari negara lain, meningkatkan stabilitas ekonomi domestik, dan menjaga kesejahteraan masyarakatnya. Selain itu, Jalur perdagangan di Laut Merah, tempat Sudan menjadi pintu gerbangnya, sangat penting bagi ekonomi UEA (Jeremy & Indrawati, 2022). Mengamankan stabilitas kawasan dapat membuat UEA melindungi arus perdagangan minyak dan barang lainnya yang sangat penting untuk menjaga kesejahteraan nasionalnya (Ching, 2024). Konflik yang berlangsung di Sudan dapat mengancam investasi besar UEA di bidang pertanian, pelabuhan, dan infrastruktur lainnya. Dengan mendukung pihak tertentu dalam konflik, UEA berupaya melindungi aset-aset ekonominya yang mendukung kesejahteraan jangka panjang negaranya. Bantuan kemanusiaan yang diberikan UEA di Sudan tidak hanya bertujuan untuk mengurangi penderitaan di negara tersebut, tetapi juga untuk memperkuat citra UEA sebagai negara yang peduli dan aktif dalam komunitas internasional (Mohammed, 2023). Citra positif ini dapat meningkatkan daya saing UEA dalam perdagangan global dan diplomasi, yang secara tidak langsung mendukung kesejahteraan rakyatnya (M. Staff, 2023).
  - 4) Kedudukan negara: Kepentingan geopolitik Uni Emirat Arab dalam Perang Saudara Sudan dipengaruhi oleh strategis di kawasan Afrika Timur. Sudan berada di tepi Laut Merah, yang merupakan jalur perdagangan internasional penting (Lutvihana & Kusuma, 2023). Uni Emirat Arab (UEA) memiliki kepentingan untuk mengamankan pengaruhnya di kawasan ini, terutama untuk melindungi jalur perdagangan dan memperkuat kehadiran militernya di Afrika Timur. Persaingan juga terjadi di negara lain, seperti UEA bersaing dengan Turki, Qatar, dan Iran untuk mendapatkan pengaruh di Sudan dan kawasan sekitarnya. Dukungan UEA terhadap pihak-pihak tertentu dalam konflik ini sering dikaitkan dengan upayanya untuk menahan pengaruh ideologi politik Islamis yang didukung Qatar dan Turki (Sidhu, 2024).
  - 5) Kekuasaan: Uni Emirat Arab (UEA) memiliki investasi besar dalam kepentingan sektor pertanian Sudan serta rencana ambisius untuk pembangunan pelabuhan di Laut Merah, yang merupakan



bagian dari strategi lebih luas untuk mengembangkan jaringan pelabuhan di sepanjang pantai Afrika. Sudan menerima bantuan senilai AED40 juta (setara dengan US\$10,8 juta) dari Emirat dalam bentuk perlengkapan pertanian, sebagaimana diumumkan oleh Dana Pembangunan Abu Dhabi (ADFD) pada Maret 2020 (Ibrahim, 2023). Bantuan ini diberikan sebagai bagian dari komitmen Uni Emirat Arab (UEA) untuk mendukung sektor pertanian di Sudan. Dalam pernyataan tersebut, dijelaskan bahwa bantuan pembangunan ini mencakup penyediaan sembilan juta kantong untuk pengemasan produk pertanian dan hasil tanaman. Menurut Abu Dhabi Fund for Development (ADFD), pengiriman pertama bantuan pertanian, yang terdiri dari 3.315.000 kantong kemasan, telah disalurkan kepada pemerintah Sudan melalui koordinasi dengan Kedutaan Besar UEA di Sudan dan Bank Pertanian Sudan. Sisanya direncanakan akan dikirimkan sebelum akhir April 2020. Bantuan ini merupakan bagian dari paket dukungan senilai US\$3 miliar yang telah disetujui oleh UEA untuk membantu stabilitas ekonomi dan keuangan Sudan (Mohammed, 2023).

- 6) Ekonomi: Sejak 2018, UEA telah menginvestasikan lebih dari US\$6 miliar di Sudan (Ibrahim, 2023), mencakup dukungan untuk cadangan devisa negara tersebut, proyek-proyek pertanian, serta pembangunan pelabuhan di sepanjang Laut Merah. Namun, Abu Dhabi juga menghadapi tuduhan terlibat dalam penyelundupan emas ilegal, dengan sebagian besar hasil akhirnya dikirim ke Rusia (Redaction Africanews, 2024). Kepentingan ekonomi ini sering kali dilindungi melalui kemitraan dengan kelompok yang mengendalikan tambang emas strategis, didukung oleh keterlibatan kontraktor seperti Wagner Group. Investasi ini tidak semata-mata berfokus pada keuntungan ekonomi, tetapi juga bertujuan untuk memperluas pengaruh politik Uni Emirat Arab di Sudan. Dengan menguasai sektor-sektor vital seperti pertambangan emas, pertanian, dan infrastruktur, Abu Dhabi menempatkan dirinya sebagai aktor utama dalam perekonomian Sudan. Dominasi ini tidak hanya mendatangkan keuntungan besar tetapi juga menciptakan ketergantungan ekonomi Sudan terhadap UEA. Strategi ini sekaligus memperkuat hubungan UEA dengan kekuatan global lainnya, termasuk Rusia (Mathew, 2024).

Kepentingan nasional UEA diarahkan untuk mengejar kekuasaan, kekuatan destruktif (*hard power*) digunakan sebagai sarana untuk mencapai tujuan tersebut. Dukungan politik dan militer yang diberikan UEA kepada faksi-faksi tertentu di Sudan mencerminkan strategi ini. Dengan memanfaatkan konflik internal Sudan, UEA berupaya menciptakan perimbangan kekuatan yang menguntungkan kepentingan nasionalnya, termasuk memperkuat hubungan dengan aktor lokal yang memiliki kendali atas sumber daya alam strategis (Viroli, 1998). Konsekuensi dari pendekatan ini adalah munculnya persaingan kekuatan dan konflik di Sudan, di mana Uni Emirat Arab (UEA) secara aktif terlibat dalam mendukung pihak-pihak tertentu untuk mempertahankan pengaruhnya (Tobin, 2024). Sistem internasional yang anarkis dapat membuat UEA untuk memanfaatkan kekuatan militer, ekonomi, dan politiknya tanpa hambatan signifikan dari otoritas internasional. Hal ini tercermin dalam bagaimana UEA menjadi penerima manfaat utama dari perdagangan emas Sudan, yang sering kali dilakukan secara ilegal untuk mendanai operasi domestik dan internasionalnya. Selain itu, kepentingan UEA juga melibatkan penguatan posisinya dalam persaingan regional dengan aktor lain seperti, Qatar dan Turki, yang juga memiliki kepentingan strategis di Sudan. Dengan mendukung faksi-faksi tertentu, UEA berupaya menciptakan tatanan regional yang sejalan dengan visinya, sekaligus memastikan bahwa akses terhadap sumber daya Sudan tetap berada di bawah kendalinya (Cahyati, 2017).

## 5. Kesimpulan

Keterlibatan Uni Emirat Arab (UEA) dalam Perang Saudara Sudan tahun 2023 mencerminkan dinamika kompleks di kawasan Afrika Timur dan Laut Merah, yang didorong oleh kepentingan geopolitik dan ekonomi strategis. UEA secara aktif mendukung Pasukan Dukungan Cepat (RSF) melalui berbagai bentuk intervensi, termasuk bantuan militer, penyelundupan emas, dan investasi di sektor agrikultur serta infrastruktur Sudan. Motivasi utama UEA berpusat pada pengamanan jalur perdagangan di Laut Merah, penguatan pengaruh geopolitiknya di kawasan, dan eksploitasi sumber daya strategis seperti emas dan lahan subur. Namun, keterlibatan ini tidak lepas dari konsekuensi negatif yang signifikan. Dukungan UEA terhadap RSF memperburuk eskalasi konflik, meningkatkan jumlah korban jiwa, memperparah krisis pengungsi, dan merusak infrastruktur Sudan. Lebih jauh, tindakan UEA memperdalam ketegangan regional dan menghambat proses mediasi internasional yang bertujuan untuk memulihkan stabilitas Sudan. Dengan demikian, keterlibatan UEA lebih banyak berfungsi untuk

memenuhi ambisi nasionalnya dibandingkan menciptakan stabilitas di kawasan. Studi ini menunjukkan bahwa UEA menghadapi dilema antara mengejar kepentingan strategisnya dan memenuhi tanggung jawab internasionalnya dalam menjaga stabilitas dan perdamaian regional. Oleh karena itu, penting bagi komunitas internasional untuk mengambil langkah lebih tegas dalam mendesak UEA agar menghentikan dukungannya terhadap pihak-pihak yang memicu konflik. Pendekatan yang lebih netral, berbasis pada diplomasi, mediasi, dan pembangunan kembali, diperlukan untuk menciptakan perdamaian jangka panjang di Sudan. Kesimpulannya, meskipun UEA memiliki hak untuk mengejar kepentingan strategisnya, keterlibatannya dalam Perang Saudara Sudan telah memperburuk situasi di lapangan. Untuk mencapai solusi yang berkelanjutan, diperlukan kolaborasi internasional yang lebih inklusif dan penekanan pada kepentingan kolektif untuk perdamaian dan stabilitas di kawasan tersebut.

### **Limitasi dan studi lanjutan**

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan. Pertama, data yang digunakan bersumber dari literatur sekunder, seperti jurnal, skripsi, artikel, situs web dan buku, sehingga hasil analisis sangat bergantung pada validitas informasi dari sumber tersebut. Keterbatasan ini dapat memengaruhi kedalaman kajian karena tidak adanya data primer, seperti wawancara langsung atau observasi lapangan. Kedua, penelitian ini berfokus pada keterlibatan Uni Emirat Arab (UEA) dalam konflik Sudan pada tahun 2023, sehingga analisisnya terbatas pada periode waktu tertentu. Konteks historis maupun perkembangan setelah tahun tersebut hanya dibahas secara umum dan tidak menjadi fokus utama. Ketiga, akses terhadap sumber-sumber tertentu, terutama yang berkaitan dengan data rahasia atau laporan militer, juga menjadi tantangan yang dapat membatasi kelengkapan data penelitian. Studi lanjutan ini diharapkan dapat memperkaya pemahaman tentang keterlibatan aktor internasional dalam konflik Sudan dan memberikan kontribusi lebih luas terhadap literatur geopolitik dan hubungan internasional.

### **Ucapan terima kasih**

Dengan penuh rasa syukur, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan, dan kontribusi dalam proses penyusunan penelitian ini. Terima kasih yang mendalam penulis sampaikan kepada dosen pembimbing, Ibu Indrawati, yang telah memberikan arahan, kritik, dan masukan berharga selama proses penelitian berlangsung. Ucapan terima kasih juga ditujukan kepada keluarga tercinta atas doa, motivasi, dan dukungan tanpa henti yang menjadi kekuatan utama bagi penulis.

Penulis juga ingin mengapresiasi rekan-rekan sejawat, teman-teman diskusi, serta pihak-pihak lain yang telah memberikan bantuan, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam bentuk informasi, ide, maupun semangat selama perjalanan akademik ini. Semoga karya ini dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan menjadi inspirasi bagi penelitian selanjutnya. Terima kasih.

### **Referensi**

- Arbar, T. F. (2023). *UEA Disebut Terlibat dalam Perang Saudara di Negara Arab Ini*. CNBC Indonesia. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20231222151024-4-499612/uea-disebut-terlibat-dalam-perang-saudara-di-negara-arab-ini>
- Ayuningrum, M. (2018). Peran Karakteristik Pemimpin Sudan dalam Kasus Penolakan Agensi Kemanusiaan Asing Tahun 2009 pada Konflik Darfur. *Jurnal Analisis Hubungan Internasional*, 7(2), 47.
- Bassim, M. (2024). *Sudan envoy: UAE fuelling conflict in Sudan*. Middle East Monitor. <https://www.middleeastmonitor.com/20241108-sudan-envoy-uae-fuelling-conflict-in-sudan/>
- Cafiero, G. (2023). *In Sudan, a Saudi Arabia-UAE rivalry intensifies*. The New Arab. <https://www.newarab.com/analysis/sudan-saudi-arabia-uae-rivalry-intensifies>
- Cahyati, P. (2017). Analisis Konflik Sudan dan Sudan Selatan. *Journal of International Relations*, 3(4), 84–95.
- Chibelushi, W. (2023). *Banjir Libia: Ketika bencana yang tewaskan ribuan orang diperparah sengketa politik*. BBC News Indonesia. <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-66807356>

- Ching, N. (2024). *US urges certain 'negative actors' not to fuel Sudan's civil war*. VOA News. <https://www.voanews.com/a/us-urges-certain-negative-actors-not-to-fuel-sudan-s-civil-war/7759310.html>
- Darwich, M. (2024). *Sudan is burning and foreign powers are benefiting – what's in it for the UAE*. The Conversation. <https://theconversation.com/sudan-is-burning-and-foreign-powers-are-benefiting-whats-in-it-for-the-uae-238695>
- Dharmapati, S. P., Palguna, I. D. G., & Arsika, I. M. B. (2015). Keabsahan Sudan Selatan Sebagai Negara Merdeka Baru Dalam Perspektif Hukum Internasional. *Jurnal Kerta Negara*, 3(3), 1–5.
- Elizabeth, V. (2021). Penanggulangan Perang Saudara Antara Etnis Arab Dengan Etnis Afrika Di Sudan. *Seri Seminar Nasional Ke-III Universitas Tarumanagara Tahun 2021 Nilai Budaya Indigenous Sebagai Pendukung Sustainable Development Di Era Industri 4.0.*, 867–874.
- Giudice, V. (2024). *Sudan's Civil War: A Battleground for UAE's Ambitions*. EPIS Think Tank.
- Ibrahim, E. (2023). *The UAE Must Stop Stoking War in Sudan*. The National Interest. <https://nationalinterest.org/feature/uae-must-stop-stoking-war-sudan-206831>
- Izzurrahman, M. H., & Machmudi, Y. (2024). the Crisis of Democracy: an Empirical Assessment of Sudan After the Fall of Omar Bashir. *Jurnal CMES*, 17(1), 65. <https://doi.org/10.20961/cmcs.17.1.86471>
- Jeremy, B., & Indrawati, I. (2022). Upaya Indonesia Menjadi Tuan Rumah Pertemuan International Monetary Fund – World Bank Tahun 2018. *Global Insight Journal*, 7(1), 33–50. <https://doi.org/10.52447/gij.v7i1.5928>
- Junaidi, K., & Artikel, R. (2022). Analisis Kebijakan Pendidikan di Afrika Utara (Mesri dan Sudan) INFO ARTIKEL ABSTRAK. *Instructional Development Journal (IDJ)*, 5(1), 12–23.
- Khairunnisa, B. W. (2023). Conflict Resolution In Sudan And Its Impacts On The International Scale. *El Tarikh: Journal of History, Culture and Islamic Civilization*, 4(2), 87. <https://doi.org/10.24042/jhcc.v4i2.18435>
- Khoirunnisa, K., Matthew, B., Jubaidi, D., & Nugroho, A. Y. (2024). The Ukraine-Russia Conflict: An International Humanitarian Law Review Of The Involvement Of Foreign Fighters. *SSRN 5034705*, 1–21.
- Laqzmitha, F., & Yumitro, G. (2023). Demokratisasi Negara Sudan Pasca Berakhirnya Pemerintahan Islam. *Politeia: Jurnal Ilmu Politik*, 15(2), 212–228. <https://doi.org/10.32734/politeia.v15i2.11465>
- Lumintosari, F. R., Lumintosari, F. R., & Lumintosari, F. R. (2021). Peran Unchr Dalam Permasalahan Pengungsi Konflik Ethiopia-Tigray. *Global Mind*, 3(2), 48–58. <https://doi.org/10.53675/jgm.v3i2.292>
- Lutvihana, Y., & Kusuma, A. (2023). Mengurai Proses Sekuritisasi Krisis Iklim di Sudan Selatan Tahun 2016-2021. *Jurnal Hubungan Internasional*, 16(2), 393–411. <https://doi.org/10.20473/jhi.v16i2.51292>
- Mahjoub, H. (2024). *It's an open secret: the UAE is fuelling Sudan's war – and there'll be no peace until we call it out*. The Guardian. <https://www.theguardian.com/commentisfree/article/2024/may/24/uae-sudan-war-peace-emirates-uk-us-officials>
- Mathew, M. J. (2024). *The UAE's Role in the Sudan Crisis: Geopolitical Ambitions Amid Humanitarian Despair*. Chintan India Foundation.
- MEE correspondent. (2019). *Huge Sudanese losses in Yemen highlight fighters' role in the conflict*. Middle East Eye.
- Mohammed, F. (2023). *Crisis in Sudan: What is happening and how to help*. International Rescue Committee. <https://www.rescue.org/article/crisis-sudan-what-happening-and-how-help>
- Morgenthau, H. J. (1985). *Politics among nations : the struggle for power and peace* (Sixth). Knopf: Distributed by Random House.
- Musa, M. M. (2022). Adinugraha Thought: Textual and Contextual Approaches in Understanding Islamic Studies to Deal with Life Problems. *Jurnal Studi Ilmu Sosial Dan Politik*, 2(2), 93–99. <https://doi.org/10.35912/jasispol.v2i2.1685>
- Najmasani, N. (2023). Kebijakan Poitik Luar Negeri UEA dalam Normalisasi Hubungan Diplomatik dengan Israel. *ResearchGate, July*.

- Natamiharja, R., Dwi Anugrah Panjaitan, O., Setiawan, I., & Lampung, U. (2025). Arbitrase Internasional: Evaluasi Efektivitasnya sebagai Mekanisme Penyelesaian Sengketa Alternatif (International Arbitration: An Evaluation of Its Effectiveness as an Alternative Dispute Resolution Mechanism). *Jurnal Ilmiah Hukum Dan Hak Asasi Manusia (JIHHAM)*, 4(2), 83–89. <https://doi.org/10.35912/jihham.v4i2.3297>
- Nindar, W., Permata, D., & Octavia, A. M. (2023). Upaya resolusi konflik perang saudara somalia. *Kolaborasi Resolusi Konflik*, 5, 90–95.
- Nugraha, A., Sinaga, O., & Dermawan, W. (2022). Kontradiksi Perilaku Republik Rakyat China di Asia Tenggara: Geopolitik dan Kepentingan Nasional. *Jurnal Studi Ilmu Sosial Dan Politik*, 2(2), 101–112. <https://doi.org/10.35912/jasispol.v2i2.1843>
- Nugroho, A. Y. (2019). Global Insight Journal. *Global Insight Journal*, 04(01), 45–59.
- Ochieng, B. (2023). *Apa yang terjadi di Sudan: Perang bintang paramiliter dan militer yang mengakibatkan nyaris 100 tewas dan ribuan luka-luka*. BBC News Indonesia. <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-65297964>
- Plano, J. C., & Olton, R. (1988). *The International Relations Dictionary* (Fourth). Clio Press Ltd.
- Pradana, E., Sudrajat, S., Nauli, P., & Yuliansyah, Y. (2021). Pengaruh Political Connection terhadap Cumulative Abnormal Return dan Trading Volume Activity pada Pemilihan Presiden 2019. *Jurnal Studi Pemerintahan Dan Akuntabilitas*, 1(1), 83–95. <https://doi.org/10.35912/jastaka.v1i1.290>
- Prendergast, J., & Lake, A. (2024). *The UAE's secret war in Sudan*. <https://www.genocidewatch.com/single-post/the-uae-s-secret-war-in-sudan>
- RA, F. R., Dermawan, W., & Akim. (2019). Pendekatan Negosiasi Konflik dalam Resolusi Konflik di Sudan Selatan. *Jurnal ICMES*, 3(1), 53–74.
- Redaction Africanews. (2024). *Sudan signs \$6 billion UAE deal for new Red Sea port*. Afirica News. <https://www.africanews.com/2022/12/14/sudan-signs-6-billion-uae-deal-for-new-red-sea-port/>
- Rickett, O. (2024). *How the UAE kept the Sudan war raging*. African Arguments. <https://africanarguments.org/2024/02/how-the-uae-kept-the-sudan-war-raging/>
- Salma, S. R. (2022). Media Power and the Rule of Law in the Rise of New Despotism: Lesson Learned from Indonesia, China, Russia, and Iran. *Jurnal Studi Ilmu Sosial Dan Politik*, 2(2), 113–129. <https://doi.org/10.35912/jasispol.v2i2.1890>
- Setyawan, F. Hardi. dan S. (2015). Gerakan Separatis Sudan's People Liberation Army (SPLA) di Sudan. *Jurnal Hubungan Internasional*, XII((1)), 1–13.
- Sidhu, A. (2024). *UAE: A New Player in African Geopolitics*. Geopolitical Monitor. <https://www.geopoliticalmonitor.Com/Uae-An-Emergent-Player-In-African-Geopolitics/>
- Sihombing, G. M. S. N. (2016). Peran Unicef Dalam Mengatasi Perekrutan Tentara Anak Di Darfur, Sudan Periode 2003-2005. *Journal of International Relations Universitas Diponegoro*, 2(June), 96–106.
- Staff, D. S. (2024). *Sudan timeline April-June 2024: Sudan war 'remains overlooked by international community.'* DABANGA SUDAN. <https://www.dabangasudan.org/en/all-news/article/sudan-timeline-april-june-2024-sudan-war-remains-overlooked-by-international-community>
- Staff, M. (2023). *Sudan timeline: From the fall of Bashir to street-fighting in Khartoum*. Middle East Eye. <https://www.middleeasteye.net/news/sudan-turmoil-bashir-fall-fighting-khartoum-timeline>
- Tobin, J. (2024). *Civil war in Sudan: Is there a path to peace?* House of Lords Library. <https://lordslibrary.parliament.uk/civil-war-in-sudan-is-there-a-path-to-peace/>
- Townsend, M. (2024). *'Smoking gun' evidence points to UAE involvement in Sudan civil war*. The Guardian. <https://www.theguardian.com/global-development/article/2024/jul/25/smoking-gun-evidence-points-to-uae-involvement-in-sudan-civil-war>
- Viroli, M. (1998). *MACHIAVELLI* (First). Oxford University Press.
- Yordan Gunawan. (2024). Civil War in South Sudan: Conflict Resolution through Mediation by the African Union. *Jurnal JurisPrudence*, 14(1), 98–107. <https://doi.org/10.23917/jurisprudence.v14i1.4224>
- Yulianti, D., Dermawan, W., & Yudistira, M. A. (2024). Analisis Kegagalan Consociational Approach dalam Perjanjian Naivasha Sudan. *Padjajaran Journal of International Relations*, 6(1), 18. <https://doi.org/10.24198/padjir.v6i1.40789>